



KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIC INDONESIA

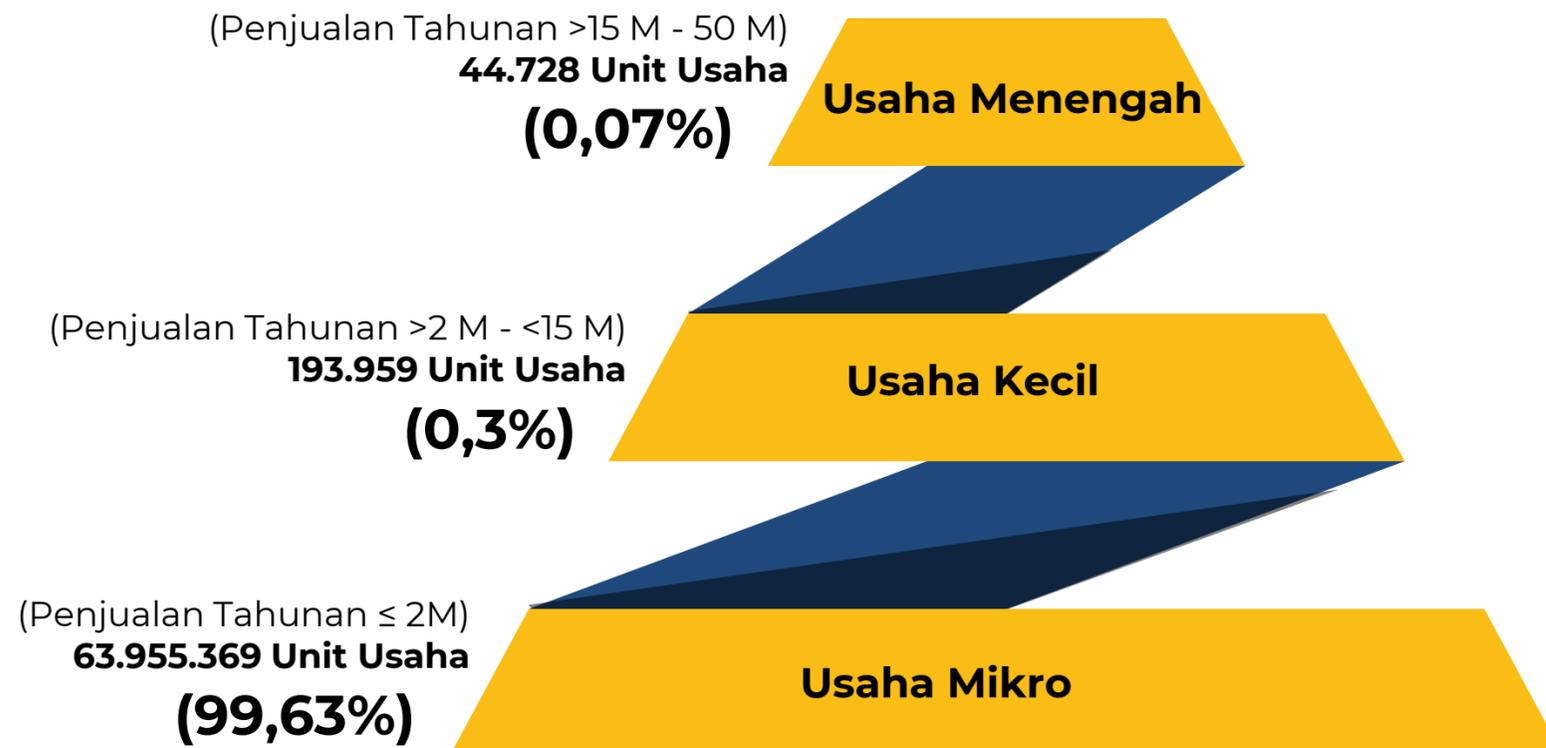
Sinergi UMKM dalam Mengakselerasi Kinerja Perekonomian Nasional

Maman Abdurrahman
Menteri UMKM Republik Indonesia

DATA UMKM

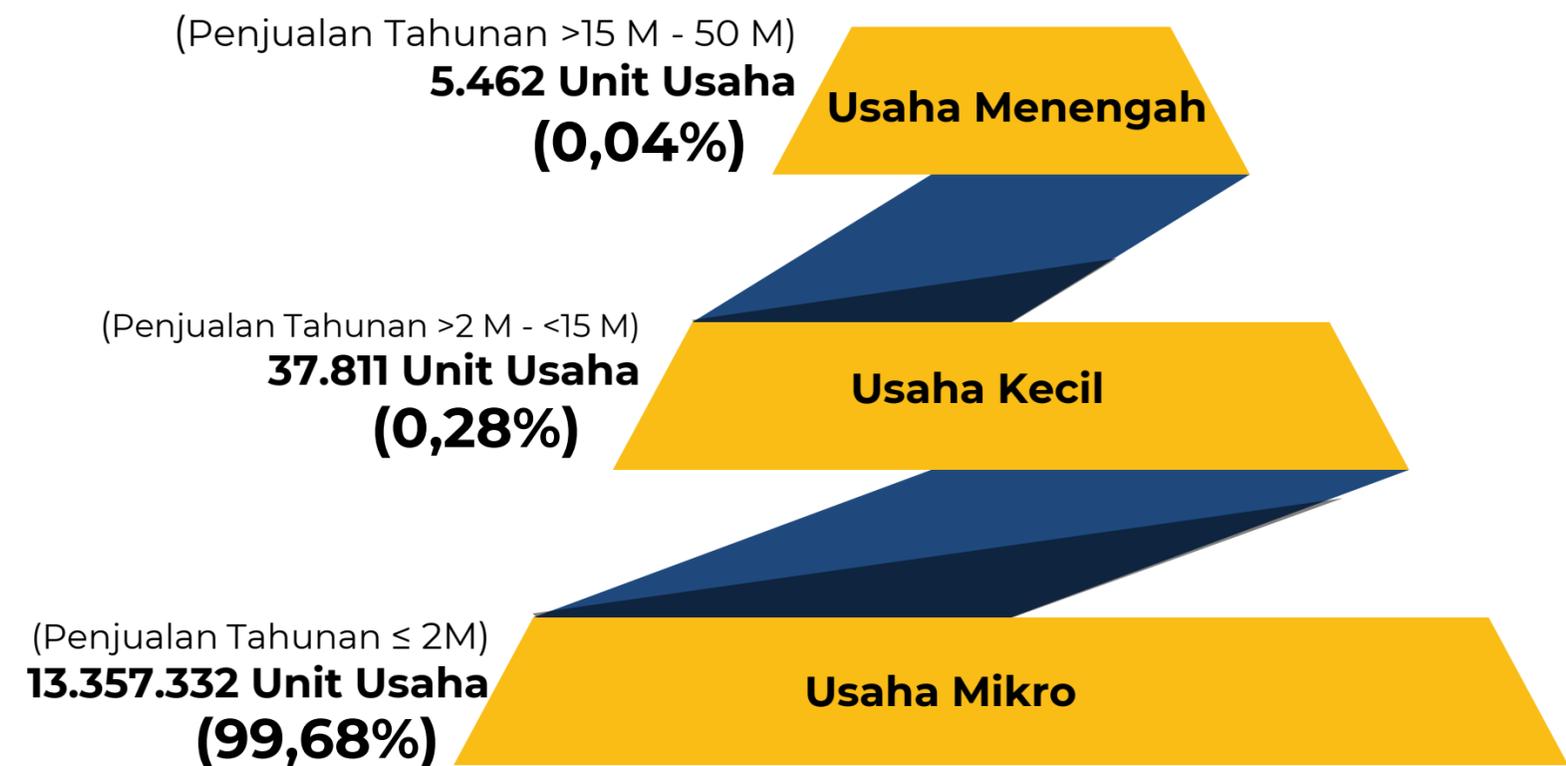
KRITERIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 7 TAHUN 2021

Data BPS Tahun 2019



Sumber: Publikasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 merupakan data diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan Total UMKM **64.194.056**

SIDT Tahun 2024



Sumber: Hasil Pendataan Lengkap KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM Hingga Tahun 2023, dengan Total Data UMKM sebanyak **13.400.605**

Tantangan & Isu Strategis UMKM



KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

Tantangan Pembiayaan untuk UKM

1. Tingginya suku bunga pada alternatif pembiayaan lain (P2P Lending, Securities Crowdfunding, Moda ventura)
2. Tidak adanya insentif pemerintah terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (kredit diatas 500 juta)

Tantangan Perluasan Pasar untuk UKM

1. Dominasi produk impor di pasar dalam negeri
2. Sulitnya akses ekspor untuk produk UMKM

Tantangan Kemitraan dan Rantai Pasok untuk UKM

1. Rendahnya akses kemitraan rantai pasok Usaha Mikro dan Kecil ke Usaha Menengah dan Besar
2. Minimnya adopsi teknologi serta masih banyaknya UMKM yang tidak memenuhi standar

Pembiayaan dan Investasi

Rasio kredit UMKM per tahun **2023** hanya mencapai **19,36%** dengan nilai kredit sebesar **Rp. 1.364 triliun** dari total nilai kredit perbankan **Rp7.044,8** dimana **46,21%** didominasi oleh usaha mikro

Realisasi P2P Lending
Per 30 Juni 2024

3,51
juta

Jumlah Debitur
UMKM (aktif)

Rp
20,72
triliun

Outstanding
Pinjaman UMKM

Realisasi Securities
Crowdfunding
hingga 30 Juli 2024

579

Penerbit
UMKM

Rp 1,15
triliun

Jumlah
Pendanaan
UKM

Perluasan Pasar

90%

Produk yang dijual
di e-commerce
merupakan produk impor

Sumber: IdeA, 2023

25,54 Juta
UMKM go digital

43,31%

UMKM yang
menjual produk
sendiri

Sumber: INDEF, 2024

Hanya **15,7%** Kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas pada tahun **2022**. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam 17%, Malaysia 28%, dan Thailand 35%.

Kemitraan dan Rantai Pasok

Partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan rantai produksi global **dinilai masih kecil** dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Tahun 2021, dilaporkan hanya mencapai **4,1 persen** dari total unit usaha. UMKM masih cenderung menjalankan usahanya sendiri-sendiri.

120 UMKM
mendapat
SNI

4,8 juta UMKM
mendapat
sertifikat
halal

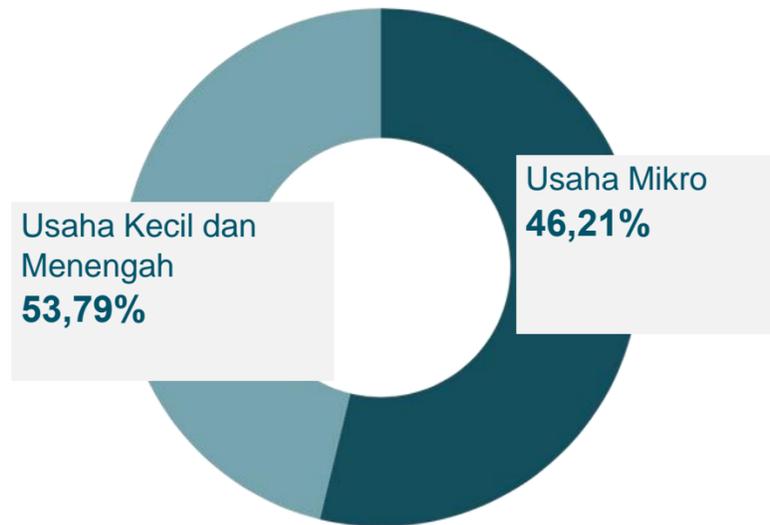
Indonesia menempati **ranking 54 Global Innovation Index** pada tahun 2024, masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Tantangan dan Isu Strategis Pembiayaan UKM



1. Kurangnya insentif pemerintah terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

Proporsi Penerima Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2023



Rasio kredit UMKM per tahun **2023** hanya mencapai **19,36%** dengan nilai kredit sebesar **Rp. 1.364 triliun** dari total nilai kredit perbankan **Rp7.044,8 triliun**.

53,79% kredit adalah **kredit skala kecil dan menengah yang tidak mendapatkan insentif dari pemerintah**

Sumber: BI, 2024

2. Tingginya suku bunga pada alternatif pembiayaan lain (*P2P Lending, Securities Crowdfunding, Moda Ventura*)

P2P LENDING

sebagai alternatif solusi pembiayaan bagi UMKM berbasis teknologi yang mudah dan cepat

Realisasi P2P Lending Per 30 Juni 2024



Sumber: OJK, 2023-2024

SECURITIES CROWDFUNDING

sebagai alternatif solusi pendanaan/ pembiayaan jangka panjang bagi UKM yang aman

Realisasi Securities Crowdfunding hingga 30 Juli 2024



Sumber: OJK, 2023-2024

INVESTASI MELALUI PASAR MODAL

Jumlah UKM Terdaftar di BEI (2006-2023)



UKM Tercatat di Papan Akselerasi Th 2023



Sumber: (BEI, 2024)



Capaian Skema Pembiayaan KUR



Alternatif Skema Pembiayaan (1)



Innovative Credit Scoring

Membantu UMKM mengakses pembiayaan lebih mudah dengan menggunakan data alternatif seperti transaksi digital, media sosial, dan perilaku pembayaran.



Modal Ventura (VC) dan Angel Investor

Sumber pendanaan strategis bagi UMKM untuk mempercepat pertumbuhan, dengan VC fokus pada tahap lanjut dan Angel Investor mendukung tahap awal.

Solusi : Mengembangkan Konsep Skema Kredit Agregator & Penyedia Barang Jasa untuk Skala Kecil dan Menengah

- 1. Kredit Program untuk UKM Agregator dengan skema pembiayaan rantai pasok**
- 2. Kredit Program untuk UKM penyedia barang dan jasa pemerintah**

Key features:

- Subsidi suku bunga: komersial 3%.
- Plafon diatas Rp500 juta - Rp2 Miliar
- UKM penerima selektif dengan kriteria yang ketat.
- Optimalisasi sistem digital untuk memastikan pembiayaan lebih cepat dan efisien
- *Grace Period* yang lebih fleksibel.

AKSES INOVASI, DIGITAL, TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM RUMAH PRODUKSI BERSAMA



KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

Capaian Pembangunan

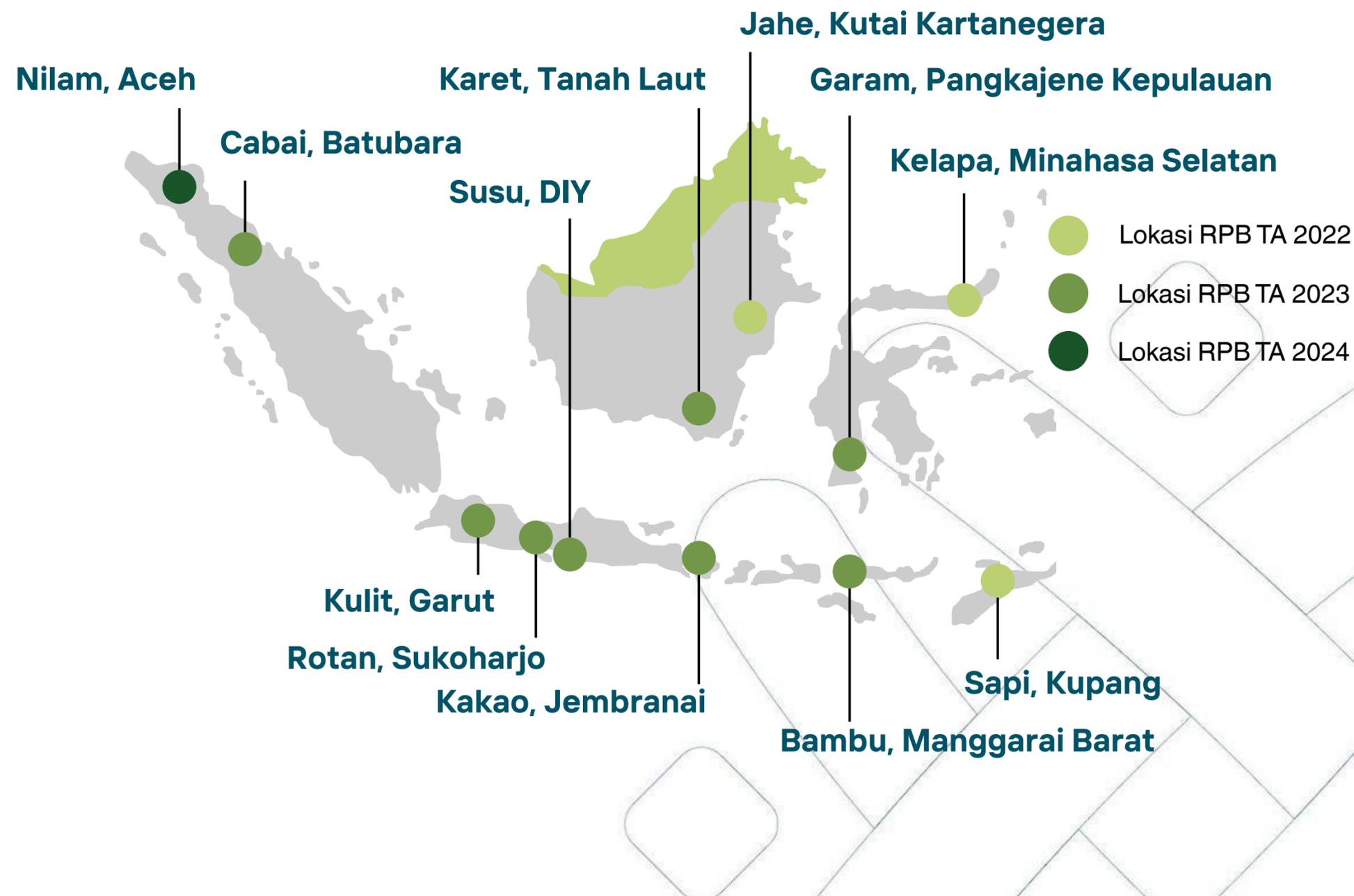
12 Komoditas
16 Lokasi

TA. 2022 : 3 Lokasi
TA. 2023 : 8 Lokasi
TA. 2024* : 1 Lokasi
*proses pembangunan

Target Kumulatif hingga Tahun 2024

Hadirnya RPB

- 1 Mendekatkan pengusaha UMKM dengan inovasi teknologi melalui pembangunan pabrik pengolahan terpadu skala menengah yang dikelola oleh koperasi.
- 2 Memperkuat ekosistem bisnis dan kemitraan antara UMKM, koperasi, dan Usaha Besar.
- 3 Meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

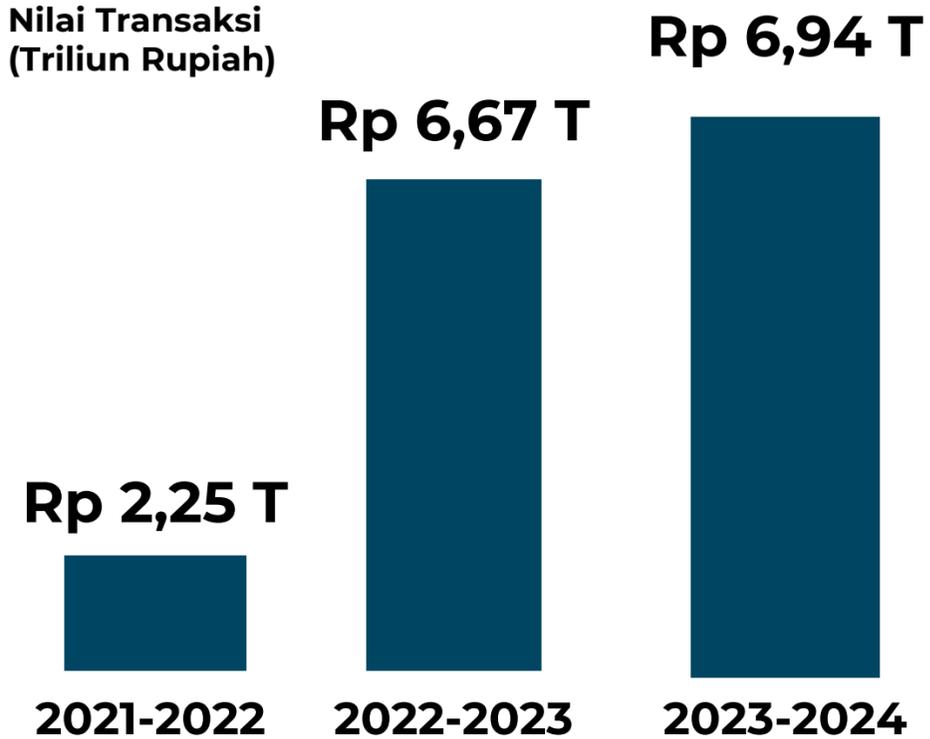




Kemitraan UMKM dengan BUMN dan Perusahaan Besar

Kemitraan dengan BUMN

Nilai Transaksi
(Triliun Rupiah)



Rp 16,14 T

Total nilai transaksi (2021 - April 2024)



254.583 UMKM



23 BUMN

- terjalin kemitraan per April 2023 - April 2024

8 Perusahaan Besar

(Kerjasama/MoU dengan Kementerian UMKM)

800 UMKM ➤ Rp33,82 M

menjalin kemitraan dengan perusahaan besar

total nilai transaksi

Note : Data per tanggal 27 September 2024

8 Perusahaan Besar (Kerjasama/MoU dengan Kementerian UMKM)





UKM Holding

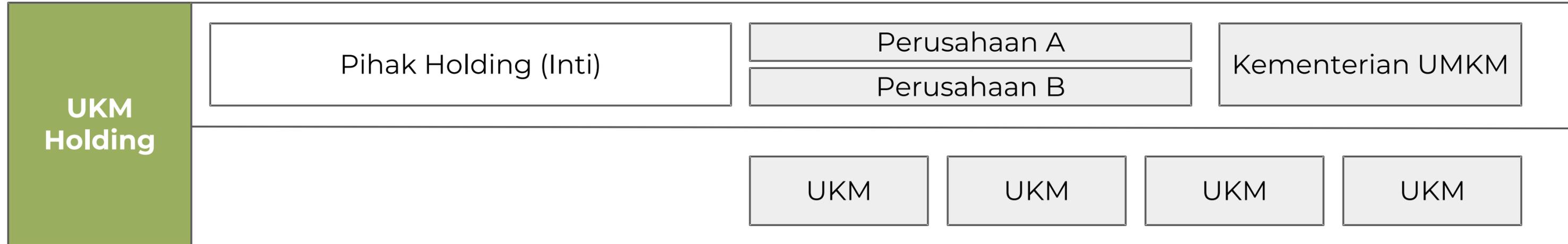
Konsep UKM Holding

- Merupakan **kesatuan / kolaborasi usaha yang terintegrasi dari para pengusaha Mikro , Kecil dan Menengah yang akan naik kelas dalam pada suatu sub sektor** tertentu ke dalam satu usaha yang lebih besar yang tergabung dalam UKM Holding.
- Hasil produk UKM Holding **tidak menghilangkan identitas atau brand asli dari UKM anggota** dimana akan **didampingi Holding, Smesco dan Kementerian UMKM**

Manfaat UKM Holding

- Supply chain/rantai pasok lebih terjaga, tersedia, dan ada kepastian bahan.
- UKM Holding dapat memberikan kepastian dan jaminan produk yang akan dibeli/dipasarkan.
- Bagi pengusaha UKM Holding dapat memfasilitasi research and development produk, rantai pasok bersama, market intelligence dan sertifikasi produk
- Bisa bertemu dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha di sektor industri, tertentu
- Akan mendapatkan prioritas untuk memperoleh bahan baku dan akses pasar di Sub Sektor tertentu.
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusaha akan mendapatkan layanan pembiayaan dari UKM Holding.

Konsep dan Basis Legal entitas UKM Holding



Mekanisme Legalitas UKM Holding

- Model **kemitraan inti-plasma** dapat digabungkan dengan **konsep PT-Kooperativistik** untuk membangun UKM Holding yang inklusif dan berdaya saing.
- Dalam skema ini, entitas **holding bertindak sebagai "inti,"** menyediakan dukungan berupa modal, pelatihan, dan akses pasar, sementara **UKM anggota berperan sebagai "plasma," fokus pada produksi sesuai standar.**
- Kemitraan ini memperbolehkan **anggota UKM holding yaitu pihak plasma untuk memiliki saham** melalui skema Employee Stock Ownership (ESOP)

Konsep PT Kooperativistik

- PT-Kooperativistik adalah model perusahaan yang menggabungkan **prinsip-prinsip koperasi ke dalam struktur Perseroan Terbatas (PT).**
- Model ini memberikan ruang bagi karyawan untuk menjadi pemegang saham perusahaan melalui **skema Employee Stock Ownership Plan (ESOP), sehingga mereka memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan bisnis.**
- Salah satu keunggulan utama model ini adalah kemudahan pendirian, yang **hanya membutuhkan dua pendiri namun keanggotaan dapat 300 sebelum IPO,** dibandingkan koperasi tradisional yang memerlukan minimal sembilan anggota.

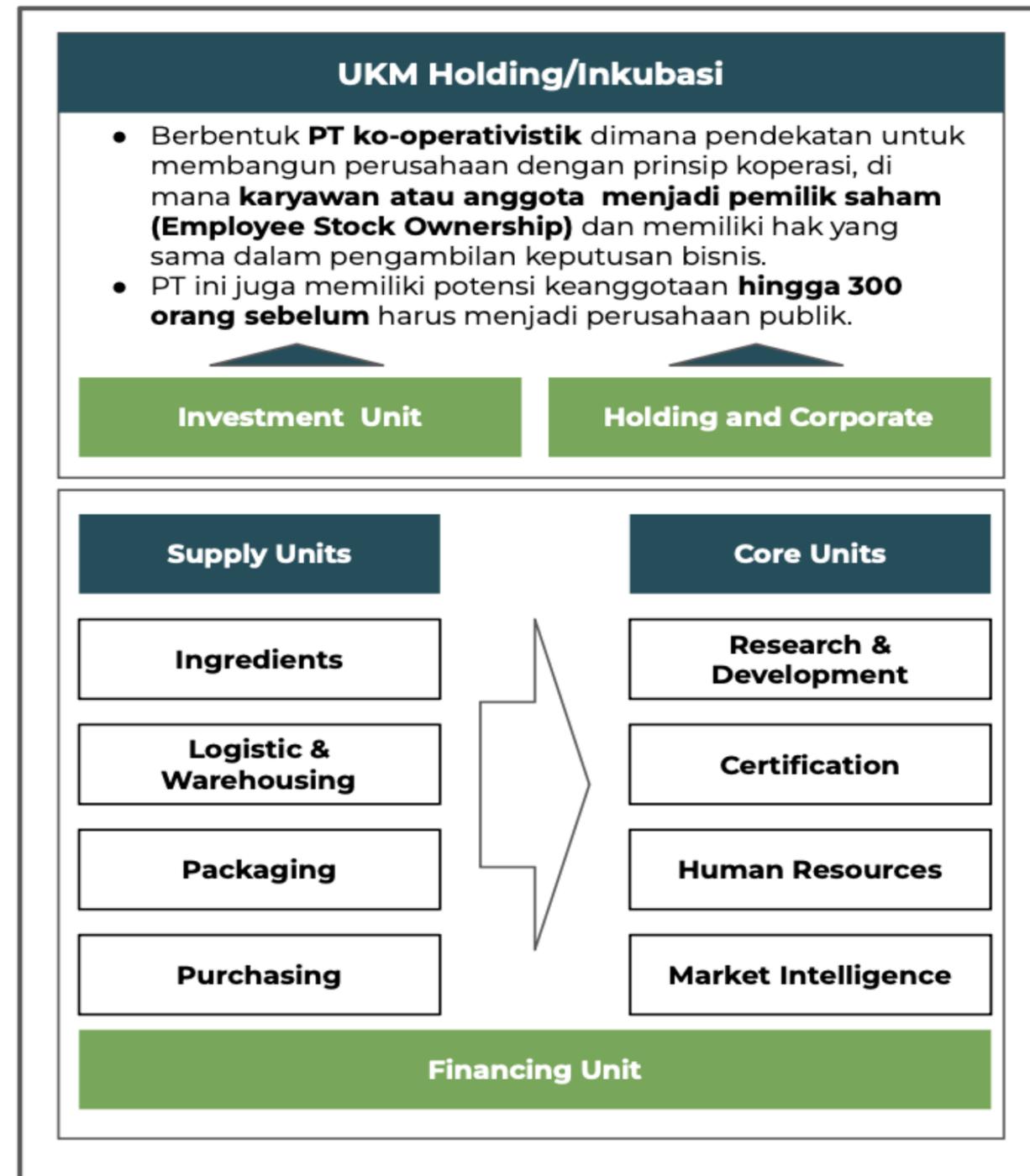
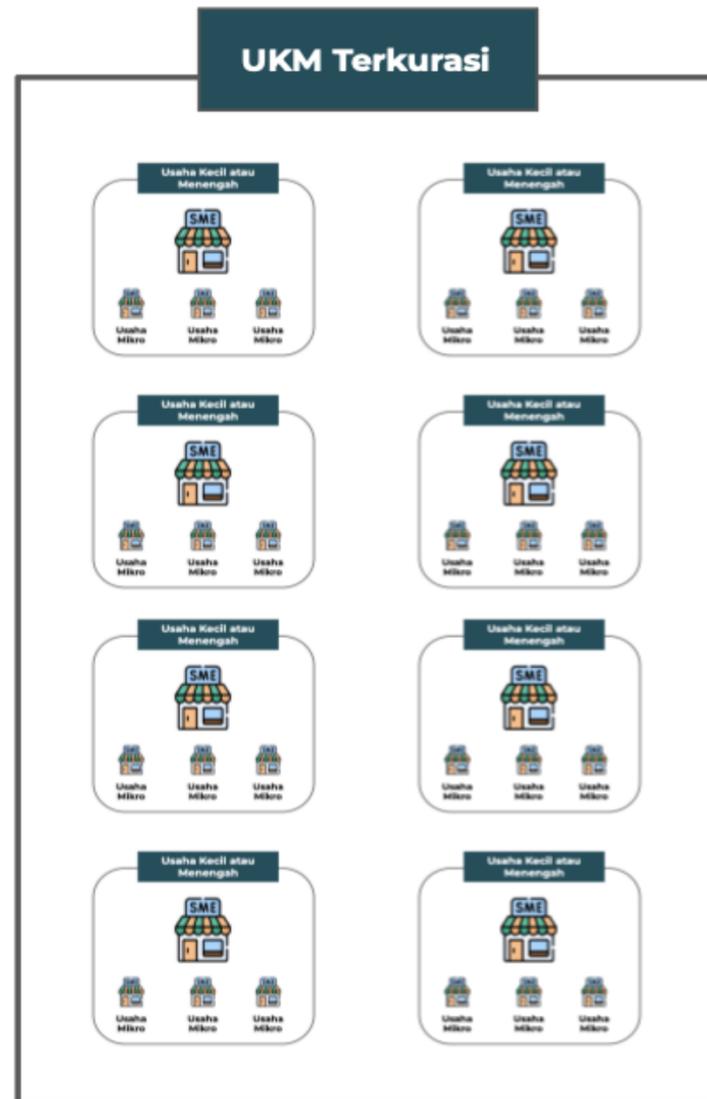
Peran Kementerian UMKM

- Kementerian UMKM dapat **memiliki saham yang akan diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga khusus** yang bertindak sebagai pemegang saham pemerintah.
- Kementerian **berfungsi sebagai pengawas atau pembina untuk memastikan pola kemitraan berjalan** sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi UKM anggota.

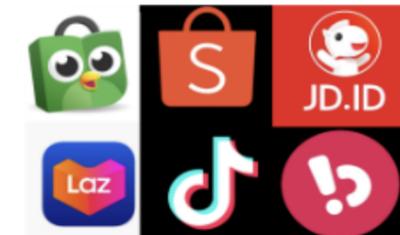
Dasar Hukum

- **Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)** : Mengizinkan penerbitan saham untuk mitra plasmanya dalam bentuk skema Employee Stock Ownership Plan (ESOP).
- **POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keberlanjutan:** Mendorong perusahaan untuk memasukkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial dalam model bisnisnya.
- **KUHPerdata Pasal 1618–1652** mengatur tentang perjanjian kemitraan, yang menjadi dasar legal untuk mengikat kerja sama antara inti dan plasma.

Model Bisnis UKM Holding



E-commerce



Ekspor



Pemerintah/BUMN



Klasterisasi Komoditas UKM

- UMKM yang terlibat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- UMKM yang terlibat pada program penyediaan 3 juta Perumahan Rakyat
- UMKM Handicraft dan Furniture
- UMKM Fashion dan Modest Fashion
- UMKM Sektor Pertanian
- UMKM Sektor Perikanan
- UMKM Produk Herbal dan Obat



Sasaran

Sinkronisasi Data UMKM dengan
Kartu Usaha

Peningkatan Proporsi UMKM yang
Memiliki Izin Usaha

Proporsi Kredit UMKM terhadap
Kredit Perbankan

Rasio Pengusaha UMKM Dibantu
Buruh Tetap terhadap Pengusaha
UMKM Dibantu Buruh

Target 2029

100%

20%

25%

22.5%

Metode

Sinkronisasi Kartu dengan Member
SAPA UMKM

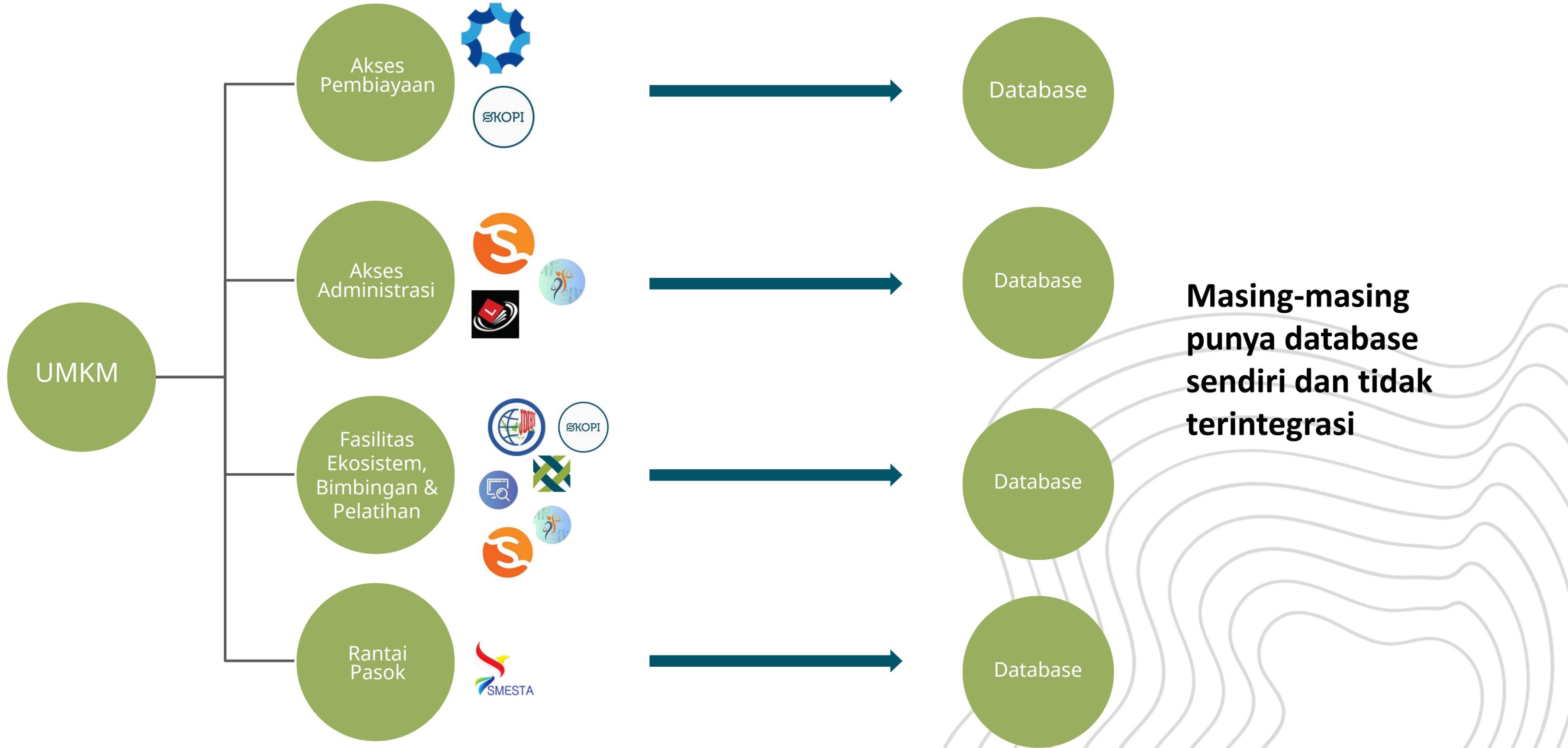
Database SAPA UMKM > Legalitas
Usaha

Database SAPA UMKM > Status
Kredit

Database SAPA UMKM > Modul
Manajemen Usaha > Human
Resource Management



“SAPA UMKM”





KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih